

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dari berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri yang mengalami tindak pidana kekerasan oleh suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang mereka alami kepada para penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar seorang suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), oleh karena itu tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.¹

Dalam beberapa tahun ini kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fenomena menarik yang terjadi didalam masyarakat dan sudah merupakan isu global. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja dalam bentuk seminar, loka karya, diskusi,

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 135

maupun, dialog publik oleh para praktisi, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat luas dalam lingkup nasional, akan tetapi perbincangan ini terjadi dalam forum internasional. Kekerasan disini merupakan kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan/istri baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Namun yang ingin ditonjolkan disini adalah kekerasan terhadap perempuan/istri di dalam rumah tangga.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup dan terjaga kerahasiaanya karena terjadi didalam keluarga. Kedua, kekerasan yang terjadi sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala rumah tangga. Ketiga, tidak seorangpun diperbolehkan ikut campur dalam urusan rumah tangga karena hal itu merupakan urusan pribadi dalam keluarganya. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang formal (resmi) yaitu perkawinan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Riska Adi Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Unissula Semarang Tahun 2015, hal 2

³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, harus ada upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban KDRT, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap para pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban KDRT perlu dilindungi karena :

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan terhadap diri korban akan bermakna kehancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian system kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terdapat korban KDRT, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁴

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

⁴Titon Slamet Kurnia, *reparasi (reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I, hal 29

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT⁵:

Pertama, suami merasa dirinya lebih berkuasa daripada istrinya, dan istrinya merasa bahwa ia harus melakukan kehendak suaminya. Gagasan tersebut telah terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, bahwa seorang wanita adalah obyek seks, istri adalah pelayan suami. Hal ini telah kuat melekat dalam pandangan para suami sehingga peraturan yang ada dalam hukum pidana maupun norma-norma kesusilaan merasa terkalahkan.

Kedua, faktor ketergantungan ekonomi pada suami merupakan faktor dominan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, dan ini sangat mempengaruhi pemahaman istri terhadap tindakan suami yang keras dalam keluarganya serta memaksa sang istri untuk menerima perlakuan kekerasan suami sehingga membuat istri tidak mau melaporkan kepada institusi hukum dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga konsultasi perkawinan.

Ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini yang paling sering dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena persaingan. Hal ini terjadi karena suami/istri dari latarbelakang yang sama, misalnya dalam pendidikan, umur, pekerjaan, dan gaji yang seimbang. Hal ini menciptakan rasa persaingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga suami tidak mau disepelkan begitupun dengan istri.

Kelima, frustrasi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, hal ini bisa disebabkan karena suami belum

⁵ Anastasia Innurtrisniyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Yustika Medika Hukum dan Keadilan*, Vol 14, Surabaya, 2011, hal 108

mampu melakukan sesuatu untuk istri dengan alasan belum siap menikah, belum memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemampuan yang masih serba terbatas karena masih tergantung kepada orang tua dan karena istri belum mempunyai anak.

Adapun akibat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban KDRT pada umumnya mengalami stress dan depresi. Selain itu korban KDRT juga ketakutan dan trauma. Tidak hanya itu saja, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku KDRT. Adanya cacat fisik atau berujung pada perceraian.

Ada ungkapan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT. Adapun kiat mencegah sebelum terjadinya KDRT antara lain⁶ :

- 1) Keluarga wajib mengajarkan ajaran agama. Seorang suami harus menjadi imam bagi istri, anak-anak dan keluarga. Serta seorang suami harus bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik.
- 2) Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri dan anak-anak.
- 3) Istri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan pernah memukul dan berkata kasar.
- 4) Kalau ada permasalahan harus diselesaikan dengan cara berdialog ataupun musyawarah.

⁶<https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, diakses pada tanggal 2 agustus 2018, jam 14.30

- 5) Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta bantuan kepada orang yang dituakan untuk dilakukan mediasi.

Upaya penanganan dalam KDRT antara lain:

- 1) Istri dan suami melakukan dialog. Keduanya harus bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah yang menyebabkan terjadinya KDRT. Jika anak-anaknya sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada ayahnya, jika KDRT dilakukan oleh suami.
- 2) Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan dengan hukum Negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
- 3) Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberikan solusi terhadap penyelesaian KDRT agar tidak terus terulang.
- 4) Jika korban KDRT sudah terlalu parah (luka-luka), maka dilakukan visum.
- 5) Laporkan kepada pihak berwajib bahwa telah terjadi KDRT. Melapor kepada aparat kepolisian merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung pada perceraian.

Dari pernyataan diatas korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menurun, apabila jika terjadi KDRT hendaknya segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga kasus tersebut dapat segera ditangani dan korban KDRT segera mendapatkan perlindungan, sehingga ditahun yang akan datang kita tidak lagi mendengar banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun peran aparat penegak hukum dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga⁷ :

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20 UU KDRT)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban KDRT untuk mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Setelah menerima laporan tersebut kepolisian harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. Melakukan penyelidikan.

2. Peran Advokat

Dalam memberikan perlindungan dan pelindungan bagi korban maka advokat wajib :

- a. Memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 68-70

- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka, setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus :

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- b. Atas permohonan korban ataupun kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yaitu pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan mengawasi atau mengintimidasi korban.

4. Peran Kejaksaan

Lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan menjalankan tugas dan wewenang di bidang penyelidikan

dan juga penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta kewenangan kekuasaan negara.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi suatu Negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita.⁸

Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan haruslah diperhatikan dan mendapat perlindungan hukum, KDRT merupakan masalah sosial, oleh karena itu setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahuinya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Oleh karena itu peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) haruslah maksimal. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) haruslah disadari oleh setiap orang, agar tidak terjadi lagi khususnya kekerasan terhadap seorang perempuan/istri korban KDRT.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)

B. Perumusan Masalah

⁸ Ibid, hal 6

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai pada sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan ilmu hukum pidana,

khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Untuk memenuhi tugas dalam penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

E. Terminologi

Kata-kata dalam judul di atas berdasarkan pendapat para Ahli dan di kamus Besar Bahasa Indonesia :

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah laki-laki.

⁹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id.

Korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderitanya (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

Tindak Pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Kekerasan adalah perihalnya (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan.

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode pendekatan penelitiannya adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analisis. Spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan atau memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian.

3. Metode Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data yang dikumpulkan bersumber dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat dipercaya atau hasil dari wawancara dari pihak yang terkait. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin, artinya dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan diluar pedoman yang sudah dibuat sepanjang masih *relevan* terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan melalui *responden*, maka diperlukan metode *purposive non random sampling* atau penarikan sample dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karna keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh letaknya.(M. Ali, *Penelitian KependidikanProsedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 51).

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat ataupun tulisan para ahli dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal ataupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi perundang-undangan di Indonesia.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberi penjelasan bagi sumber data primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.

c). Bahan Hukum Tersier

Sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kudus

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dari lapangan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, dimana data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan oleh *responden* baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya bisa mendapatkan sebuah skripsi Ilmiah, yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai kesimpulan jadwal penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus)” ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, korban dan tindak pidana, pandangan islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis ingin menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

